

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S- 7275 /PB/2017

2.2. Agustus 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Pelaksanaan Surveillance Audit ISO 9001:2008

pada KPPN Tahun 2017

Yth: Daftar Terlampir

Berkenaan dengan penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu bagi layanan KPPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada unit-unit pelayanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta sebagai pengakuan atas pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar pelayanan internasional, Ditjen Perbendaharaan telah berhasil menerapkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada 40 KPPN.
- Selanjutnya, sesuai dengan aturan di dalam penerapan sertifikasi ISO dimaksud maka bagi KPPN yang telah mendapatkan sertifikat wajib dilakukan surveillance audit atau audit pengawasan setiap tahunnya oleh Badan Sertifikasi untuk memastikan KPPN yang bersangkutan konsisten dan masih menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008.
- 3. Sesuai dengan data dokumen sertifikat, terdapat 17 KPPN yang tahun ini memasuki jatuh tempo sehingga harus segera dilakukan *surveillance* audit pada bulan Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Wilayah Sumatera:
    - 1) KPPN Banda Aceh
    - 2) KPPN Palembang
    - 3) KPPN Batam
  - b. Wilayah DKI Jakarta/Jawa:
    - 1) KPPN Jakarta I
    - 2) KPPN Serang
    - 3) KPPN Semarang I
    - 4) KPPN Surabaya I
    - 5) KPPN Yogyakarta
    - 6) KPPN Bandung I

- c. Wilayah Kallimantan:
  - 1) KPPN Banjarmasin
  - 2) KPPN Pontianak
  - KPPN Balikpapan
- d. Wilayah Bali/NTB/NTT
  - 1) KPPN Denpasar
  - 2) KPPN Mataram
- e. Wilayah Sulawesi/Maluku/Papua:
  - 1) KPPN Manado
  - 2) KPPN Makassar I
  - 3) KPPN Ambon
- 4. Saat ini Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sedang mempersiapkan penetapan *provider* badan sertifikasi dan jadwal final *surveillance audit* dimaksud.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara dapat segera melakukan langkah-langkah persiapan dan berkoordinasi dengan KPPN bersangkutan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q Bagian OTL dalam rangka persiapan pelaksanaan surveillance audit dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal,

Harvana

NIP 19600603 198502 1 001~

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor: S-7275 /PB/2017 Tanggal: 22 Agustus 2017

## Daftar penerima Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan:

<ol> <li>Kepala Kanwil DJPB Prov</li> </ol>	/. Aceh
---	---------

- 2. Kepala Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan
- 3. Kepala Kanwil DJPB Prov. Kepulauan Riau
- 4. Kepala Kanwil DJPB Prov. DKI Jakarta
- 5. Kepala Kanwil DJPB Prov. Banten
- 6. Kepala Kanwil DJPB Prov. Jawa Barat
- 7. Kepala Kanwil DJPB Prov. Jawa Tengah
- 8. Kepala Kanwil DJPB Prov. D.I Yogyakarta
- 9. Kepala Kanwil DJPB Prov. Jawa Timur
- 10. Kepala Kanwil DJPB Prov. Kalimantan Barat
- 11. Kepala Kanwil DJPB Prov. Kalilmantan Selatan
- 12. Kepala Kanwil DJPB Prov. Kalimantan Timur
- 13. Kepala Kanwil DJPB Prov. Bali
- 14. Kepala Kanwil DJPB Prov. Nusa Tenggara Barat
- 15. Kepala Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Selatan
- 16. Kepala Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Utara
- 17. Kepala Kanwil DJPB Prov. Maluku

## 1. Kepala KPPN KPPN Banda Aceh

- 2. Kepala KPPN Palembang
- 3. Kepala KPPN Batam
- 4. Kepala KPPN Jakarta I
- 5. Kepala KPPN Serang
- 6. Kepala KPPN Bandung I
- 7. Kepala KPPN Semarang I
- 8. Kepala KPPN Yogyakarta
- 9. Kepala KPPN Surabaya I
- 10. Kepala KPPN Pontianak
- 11. Kepala KPPN Banjarmasin
- 12. Kepala KPPN Balikpapan
- 13. Kepala KPPN Denpasar
- 14. Kepala KPPN Mataram
- 15. Kepala KPPN Makassar I
- 16. Kepala KPPN Manado
- 17. Kepala KPPN Ambon